

**PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
DI INDONESIA**



Oleh : Jumadi Simangunsong

**JURUSAN MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA 2010**

ABSTRAK

Kebutuhan informasi yang cepat, tepat dan akurat menjadi salah satu dasar perkembangan teknologi informasi. Dibagian pemerintahan kebutuhan teknologi informasi ini sudah menjadi salah satu kebutuhan primer, karena pada umumnya pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Dan salah satu tools yang bisa digunakan untuk meningkatkan peningkatan pelayanan masyarakat adalah dengan menerapkan e-government. Tetapi hingga saat ini pemaknaan implementasi e-government oleh pemerintah daerah maupun pusat masih banyak yang bersifat sendiri-sendiri, sehingga masih banyak kendala, hambatan dan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan pemanfaatan e-government di Indonesia, sehingga masih banyak pemerintah yang menggunakan e-government itu hanya sebagai penyedia informasi saja (web statik).

Kata Kunci : *e-Government, Indonesian Connected, Indonesian E-government Connected, good governence, clean governence.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, tepat dan akurat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web yang sering disebut dengan internet. Teknologi ini sudah digunakan diberbagai bidang baik bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Teknologi ini juga sudah mencakup pemerintahan yang sering disebut dengan e-government. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentu sangat membutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi yang dapat meningkatkan efisiensi kegiatan pemerintahan, baik dari segi kecepatan akan kebutuhan informasi maupun dari segi peningkatan pelayanan masyarakat. Pengembangan aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara online, karena mereka lebih menyukaimetoda pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung, surat-menyurat atau telepon. Kita harus belajar dari penyebab-penyebab kegagalan e-government di sejumlah negara yangdisebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. E-government dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui e-mail. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama.

Disamping kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat pengembangan e-government di Indonesia juga didukung oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

1.2 Tujuan

Tujuan dari pengembangan e-government adalah:

1. Pembentukan jaringan informasi yang berkualitas dan dapat diakses dari mana saja.
2. Peningkatan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat.

3. Meningkatkan integritas dan Profesionalitas aparat pemerintah.
4. Pembentukan saluran komunikasi yang lebih efisien dan efektif.
5. Pembentukan sistem manajemen yang lebih transparan.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penyusunan *Paper* ini dibatasi pada :

1. Menjelaskan tentang perkembangan e-government di Indonesia.
2. Mengkaji secara singkat beberapa aplikasi e-government yang telah diterapkan di beberapa aspek pemerintahan di Indonesia.
3. Menjelaskan tentang keuntungan, hambatan dan tantangan dari e-government .
4. Memberikan gambaran strategi pengembangan e-goverment.

1.4 Analisa permasalahan

1. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang dapat diandalkan dan terpercaya serta mudah dijangkau.
2. Masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar
3. Sistem kerja pemerintah dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku
4. Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando, sektoral yang mengerucut dan panjang sehingga terkesan birokrat.
5. Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.
6. Tuntutan akan kebutuhan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat.

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1 Teori Umum

Konsep *e-Government* dideskripsikan secara beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal tersebut dapat di lihat dari berbagai definisi. di bawah ini mengenai e-gov di berbagai negara sesuai dengan sudut pandang sistem pemerintahan mereka :

a. Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan *e-Government* secara ringkas, padat, dan jelas, sebagai : *E-Government mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintahan melalui internet atau media digital lainnya*[1]. Sementara Nevada, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, mendefinisikan *e-Government* sebagai :

- *Pelayanan online menghilangkan hambatan tradisional untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dan bisnis dalam memakai layanan pemerintahan.*
- *Operasional pemerintahan untuk konstitusi internal dapat disederhanakan permintaan operasinya untuk semua agen pemerintah dan pegawainya.*

b. Pemerintah New Salendia melihat *e-Government* sebagai berikut : *E-Government adalah sebuah cara bagi pemerintahaan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi*

- c. Menurut kominfo, “*e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien”
- d. World Bank mendefinisikan bahwa “*e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh kantor-kantor pemerintahan untuk pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dunia usaha dan untuk memfasilitasi kerjasama antar institusi pemerintah”

Mengapa definisi *e-government* menjadi beragam ?, ada beberapa faktor penyebabnya yang semua bermuara pada beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Konsep *e-Government* memiliki prinsip-prinsip dasar yang umum, tetapi karena setiap Negara implementasi atau penerapannya berbeda-beda, maka konsep *e-Government*-pun menjadi beraneka ragam.
2. Wahana aplikasi *e-Government* sangatlah lebar mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.
3. Pengertian dan penerapan *e-Government* di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan.

Secara umum, *e-gov* di definisikan sebagai : Pemerintahan elektronik (juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau *transformational*

government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Model e-government yang diterapkan di negara-negara luar adalah juga menggunakan model empat tahapan perkembangan e-government dalam perencanaan jangka panjang. Sebagai contoh, pentahapan e-government yang diterapkan di Selandia Baru digambarkan memiliki empat tahapan/fase yaitu :

1. *Fase pertama*, fase penampilan *website* (*web presence*). Dalam fase ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam *website* pemerintah.
2. *Fase kedua*, interaksi. Dalam fase ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas *download* dan komunikasi *e-mail* dalam *website* pemerintah.
3. *Fase ketiga*, transaksi. Aplikasi/formulir untuk transaksi bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara online mulai diterapkan.

4. *Fase Keempat*, fase transformasi. Dalam hal ini, pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (pemerintah ke antarpemerintah, sektor nonpemerintah, serta sector swasta).

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan E-government di Indonesia

Saat ini kita bisa melihat perubahan yang sangat cepat seiring perkembangan e-government yang diberlakukan di Indonesia. Beberapa contoh perubahan yang sangat nyata adalah penambahan situs-situs pemerintah pusat, daerah, departemen, kementerian, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan ada ke desa. Tetapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk salah satu negara yang perkembangan e-governmentnya tergolong lambat. Bahkan berdasarkan informasi yang dimuat di <http://en.wikipedia.org/wiki/E-Government> Indonesia belum bisa masuk ke dalam urutan 50 besar dalam penggunaan e-government. Dan berdasarkan informasi yang dijelaskan di Global E-Government Readiness 2005¹⁷ dan 2008¹⁸ peringkat Indonesia didalam penerapan e-government ada diurutan sebagai berikut:

No	Negara	2004	2005	2008
1	Singapore	8	7	23
2	Malaysia	42	43	34
3	Thailand	50	46	64
4	Philippines	47	41	66
5	Brunei	63	73	87
6	Viet Nam	112	105	91
7	Indonesia	85	96	106
8	Cambodia	129	128	139
9	Myanmar	123	129	144
10	East Timor	174	144	155
11	Laos	144	147	156

Tabel 1 Ranking E-Government Readiness 2005-2008

Meski ditingkat Asia atau Dunia ranking Indonesia masih tergolong jauh, tetapi saat ini perkembangan e-government di tingkat pusat maupun daerah tetap berkembang. Beberapa daerah di Indonesia yang sudah mengembangkan e-government diantaranya:

No	Nama Lembaga	Total	Peringkat
1	Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi	865.95	A
2	Departemen Pertanian	812.7	A
3	Departemen Perindustrian	782.6	BB
4	Departemen Kelautan & Perikanan	769.68	BB
5	Kementerian Riset & Teknologi	699.71	B
6	Departemen Energi & Sumber Daya Mineral	566.4	CC
7	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	541.875	CC
8	Departemen Keuangan	529.6	CC
9	Kementerian PAN	491.85	C
10	Kementerian Pemuda & Olahraga	491.35	C
11	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	417.65	C

Tabel 2 Hasil riset peringkat E-Government tingkat kementerian tahun 2009

Sumber. www.wartaegov.com

Disamping tingkat kementerian, pemerintah daerah juga telah banyak mengimplementasikan e-government diantaranya:

1. Kabupaten Sragen mengembangkan "One Stop Service (OSS)"

OSS Center adalah sebuah institusi yang memberikan dukungan pengembangan satuan kerja layanan perijinan terpadu atau lebih dikenal dengan istilah One Stop Services disingkat OSS (lihat About OSS). OSS Center mendukung terwujudnya inovasi layanan perijinan terpadu di daerah yang pada kenyataannya masih memiliki keterbatasan untuk mengembangkan pelayanan perijinan terpadu secara prima. Berangkat

dari tingginya kompetisi bisnis di tingkat lokal dan nasional, keberadaan OSS Center akan memiliki korelasi positif terhadap perbaikan pelayanan publik pemerintah terhadap investor (baik PMA maupun PMDN) dan pebisnis lokal. Dengan terbentuknya OSS Center di tingkat nasional dan regional (propinsi), diharapkan akan memiliki andil dalam perbaikan iklim investasi dan kualitas pelayanan perijinan di Indonesia.

OSS Center akan memberikan pendampingan pada OSS bagi daerah-daerah yang membutuhkan melalui penguatan sistem dan informasi, menganalisa kebutuhan dan melakukan asistensi di tiap level kebijakan pemerintah, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari satuan kerja pelayanan perijinan usaha dan investasi, serta bentuk-bentuk asistensi lainnya. Selain itu, dengan keberadaan OSS Center ini diharapkan akan membentuk jaringan data dan informasi yang luas antar stakeholder dalam ranah investasi nasional dan lokal.

Terbentuknya OSS Center ini ternyata sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi dimana dalam kebijakan tersebut dituangkan berbagai hal yang harus diatur kembali agar iklim investasi di Indonesia dapat tumbuh dan bersaing di skala internasional. Dengan dukungan dukungan luas dari jaringan Forum Daerah (Forda UKM), lembaga-lembaga yang concern pada pengembangan usaha dan investasi baik pemerintah maupun non pemerintah, sektor swasta serta keterlibatan media cetak dan elektronik,

OSS Center diharapkan mampu menjadi motivator terciptanya perbaikan kualitas layanan perijinan usaha dan investasi di Indonesia.

Sedangkan manfaat nyata dari OSS ini adalah: OSS diharapkan mampu melayani seluruh perijinan yang dibutuhkan oleh investor dan dunia usaha di daerah masing-masing, mulai dari ijin mendirikan bangunan (IMB), ijin gangguan (HO), ijin usaha (SIUP, TDP, TDI, IUT, IUI, TDG, dll) atau ijin per sektor seperti ijin usaha restora, ijin pendirian salon dan OSS Center akan memberikan berbagai informasi dan pelatihan tentang sistem, metode, dan cara untuk mengembangkan layanan perijinan dan investasi di Indonesia yang dapat diakses secara langsung di kantor OSS Center atau melalui telepon, email, dan website (www.oss-center.net). OSS Center juga akan menghubungkan pemerintah kota/kabupaten dan OSS di seluruh Indonesia dengan lembaga pendamping atau lembaga-lembaga lain yang dapat memberikan bantuan teknis untuk pengembangan OSS.

2. Pemerintah Surabaya menerapkan e-procurement.

Dengan adanya e-procurement yang dikembangkan pemerintah Surabaya www.surabaya-eproc.or.id maka masyarakat Surabaya bisa lebih mudah untuk mengetahui proyek yang sedang ada dan mereka bisa lebih mudah untuk ikut didalam lelang tender proyek tersebut.

3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

BPPT termasuk salah satu bagian pemerintahan yang telah mengembangkan sebuah sistem TEWS yang sering disebut dengan Tsunami Early Warning System. Sistem ini digunakan sebagai pemberi

sinyal ke pusat yang menandakan kemungkinan ada tsunami. Dan jika sistem dipusat menerima sinyal dari satelit bahwa disuatu tempat akan terjadi tsunami, maka sistem control room akan menentukan sirene mana yang akan dibunyikan, dan akan mengirim sms secara langsung kepada orang-orang yang berwenang didaerah dimana kemungkinan tsunami itu akan terjadi, supaya bisa diinformasikan kemasyarakat. Sistem TEWS ini, menggunakan sistem jaringan yang sangat kompleks, dan setiap peralatan yang digunakan telah menggunakan Internet Protocol (IP) yang spesifik. Misalnya, Sirene, Sensor dan beberapa tools lainnya.

Selain contoh-contoh yang diatas, masih banyak daerah-daerah atau departemen atau lembaga pemerintahan yang lain yang telah mengembangkan e-government misalnya dibagian e-learning, e-registration, samsat dan lain sebagainya.

3.2 Hambatan dan Tantangan Pengembangan e-Government di Indoensia

Dalam pengembangan e-Government di Indonesia tidak lepas dari berbagai hambatan. Hambatan yang timbul antara lain :

3.2.1 Sumber Daya Manusia

Faktor yang menghambat adalah belum tersediannya sumber daya manusia (SDM) yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan. Pemerintah umumnya jarang memiliki SDM yang handal di bidang e-Government. SDM yang handal dan mau mempelajari bidang baru, biasanya berada di lingkungan bisnis dan industri. Permasalahan

ketersediaan SDM yang memiliki standar kompetensi dibidang ICT adalah lebih sulit dibandingkan dengan masalah teknologinya.

Masih belum meratanya pemahaman masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan e-gov karena mayoritas penduduk berada pada garis golongan menengah ke bawah. Ini menjadi faktor yang menyebabkan keraguan dalam mengimplemtasikan e-gov.

3.2.2 Infrastruktur

Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi e-government di Indonesia adalah penetrasi pasar *hardware* dan *provider* layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi belum merata hingga daerah - daerah, sehingga timbul masalah dalam infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Biaya yang relatif mahal juga menjadi salah satu factor penghambat pembangunan infrastruktur.

Sampai saat ini banyak kantor pemerintah yang sudah membangun jaringan LAN di tiap unit kerja, tetapi jaringan LAN tersebut belum terhubung dengan jaringan LAN dengan unit kerja lain.

3.2.3 Aplikasi

Dalam pembangunan sebuah e-Government, pemerintah sebagai salah satu stakeholder harusnya tahu apa permasalahan yang ada, apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengatasi permasalahan yang ada. Beberapa apalikasi e-Government tidak bisa menjawab permasalahan yang timbul. Sebagai contoh kasus penerapan e-Procurement (LPSE) , pada saat

penjelasan pekerjaan harusnya antara peserta lelang dan panitia pengadaan barang dapat melakukan interaksi secara real time.

3.2.4 Kepemerintahan/Regulasi

Komunikasi organisasi aliran komunikasi dalam hal pengelolaan e-government masih terbentur jalur birokrasi menjadi salah satu factor penghambat dalam pengembangan e-Government. Komitmen dari top management merupakan salah satu dukungan yang sangat diperlukan. Sampai saat ini project pemerintah dalam bidang e-Government banyak berupa seremonial. Dibangun dengan biaya besar, dengan tujuan yang baik tetapi tidak di manfaatkan dengan baik.

3.3 Strategi Pengembangan e-Government

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu :

a. Tingkat 1 – Persiapan

- Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga.
- Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.

b. Tingkat 2 – Pematangan

- Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif.
- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

c. Tingkat 3 – Pemantapan

- Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik.

- Pembuatan *interoperabilitas* aplikasi dan data dengan lembaga lain.

d. Tingkat 4 – Pemanfaatan

- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Consumers (G2C)*. (Buku Panduan Penyelenggaran situs Pemerintah Daerah, Depkominfo, 2003).

Disamping tingkatan yang telah dijelaskan diatas, pencapaian tujuan strategis e-government perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu :

1. Strategi pertama

Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. diharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak tersekat-sekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi, transparan dan terpercaya. Strategi ini mencakup sejumlah sasaran sebagai berikut :

- a. Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah negara pada tingkat harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat, dengan sejauh mungkin melibatkan partisipasi dunia usaha.
- b. Pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah terkait, sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan pemerintah; sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan tentang kewajiban instansi

- pemerintah dan pemerintah daerah otonom untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik secara on-line.
- c. Pembentukan jaringan organisasi pendukung yang menjembatani portal-portal informasi dan pelayanan publik tersebut di atas dengan situs dan sistem pengolahan dan pengelolaan informasi yang terkait pada sistem manajemen dan proses kerja di instansi yang berkepentingan. Sasaran ini mencakup pengembangan kebijakan pemanfaatan dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
 - d. Pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standardisasi, dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar organisasi diatas.

2. Strategi Kedua

Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah. Penataan itu harus meliputi sejumlah sasaran yang masing-masing membentuk konteks bagi pembentukan pemerintahan yang baik, antara lain meliputi:

- a. Fokus kepada kebutuhan masyarakat, kewibawaan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat serta memfasilitasi partisipasi masyarakat.
- b. Manajemen perubahan, pengembangan pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai apabila didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan manajemen untuk melakukan perubahan-perubahan sistem manajemen dan proses kerja secara kontinyu.

- c. Penguatan *e-leadership*, penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan penerintah daerah otonom perlu ditunjang oleh penguatan kerangka kebijakan yang fokus dan konsisten.
- d. Rasionalisasi peraturan dan prosedur operasi, termasuk semua tahapan perubahan, perlu diperkuat dengan landasan peraturan dan prosedur operasi yang berorientasi pada organisasi jaringan, rasional, terbuka, serta mendorong pembentukan kemitraan dengan sektor swasta.

3. Strategi Ketiga

Memfaatkan teknologi informasi secara optimal. Pelaksanaan setiap strategi memerlukan kemampuan dalam melaksanakan transaksi, pengolahan, dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan informasi. Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan jaringan komunikasi dan informasi memberikan peluang yang luas bagi instansi pemerintah untuk memenuhi keperluan tersebut. Agar pemanfaatan teknologi informasi di setiap instansi dapat membentuk jaringan kerja yang optimal, maka melalui strategi ini sejumlah sasaran yang perlu diupayakan pencapaiannya, adalah sebagai berikut :

- a. Standardisasi yang berkaitan dengan pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah.
- b. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik serta standardisasi metadata yang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur informasi pemerintah.

- c. Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem otentikasi dan public key infrastucture untuk menjamin keamanan informasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain.
- d. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah untuk menjamin akuntabilitas dan tranparansi pelayanan publik.

4. Strategi Keempat

Meningkatkan Peran Serta Dunia Usaha dan Mengembangkan Industri Telekomunikasi dan Teknologi Informasi. Pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya ditangani oleh pemerintah. Partisipasi dunia usaha dapat mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Beberapa kemungkinan partisipasi dunia usaha sebagai berikut perlu dioptimalkan.

- a. Dalam mengembangkan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standard, pemerintah harus mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.
- b. Walaupun pelayanan dasar bagi masyarakat luas harus dipenuhi oleh pemerintah, namun partisipasi dunia usaha untuk meningkatkan nilai informasi dan jasa pemerintahan bagi keperluan-keperluan tertentu harus dimungkinkan.
- c. Peran dunia usaha untuk mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah negara merupakan faktor yang penting.

Demikian pula partisipasi usaha kecil menengah untuk menyediakan akses serta meningkatkan kualitas dan lingkup layanan warung internet perlu didorong untuk memperluas jangkauan pelayanan publik. Semua instansi terkait harus memberikan dukungan dan insentif, serta meninjau kembali dan memperbaiki berbagai peraturan dan ketentuan pemerintah yang menghambat partisipasi dunia usaha dalam memperluas jaringan dan akses komunikasi dan informasi.

5. Strategi Kelima

Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.

Upaya pengembangan SDM yang perlu dilakukan untuk mendukung e-government adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi , baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi .
- b. Pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara sinergis, baik yang dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah/masyarakat.

- c. Pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan e-government.
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga; serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.
- e. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (distance learning) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi antar daerah.
- f. Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan e-government melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan program e-government, serta contoh keberhasilan (best practice) pelaksanaan e-government.
- g. Peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/ apresiasi kepada seluruh SDM bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan

pemerintah daerah dan masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan e-government.

6. Strategi Keenam

Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.

Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu pengembangan e-government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan dan sasaran yang terukur, sehingga dapat difahami dan diikuti oleh semua pihak.

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Penjelasan diatas memberikan beberapa simpulan yang penting diperhatikan dalam pengembangan sistem e-government di Indonesia. Meski saat ini sudah banyak kalangan pemerintah yang telah mengembangkan e-government, tetapi secara fungsionalnya masih banyak e-government yang dikembangkan tersebut masih sebagai penyedia informasi statik saja, bahkan bisa dikatakan bahwa masih banyak yang tergolong setengah jalan atau belum sesuai dengan yang diharapkan. Secara kuantitatif perkembangan e-government di Indonesia memang sudah menunjukkan progress yang cukup berarti tetapi secara kualitatif masih belum memadai.

Untuk lebih meningkatkan pengembangan e-government di Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka diperlukan penyempurnaan pengembangan e-government terutama dari segi infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi serta sosialisasi di internal pemerintah maupun masyarakat.

4.2 Saran

Dari permasalahan dan kebutuhan akan sistem e-government di Indonesia, maka diharapkan pemerintah lebih memperhatikan pelaksanaan e-gov dengan penyempurnaan konsep dan strategi. Bila dilakukan lebih serius dan adanya komitmen dari pemerintah maka pelaksanaan e-gov pada gilirannya akan dapat memperbaiki mutu pelayanan publik demi terciptanya *good governance* dan *clean governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budi Rahardjo, "Membangun e-Government" , www.cert.or.id.
- [2] Chandra Halim - *Indonesian Voices Network*, "Pemanfaatan e_Governance di Pemerintah Pusat dan Daerah", <http://indonesianvoices.com>.
- [3] Depkominfo, *Peluang Indonesia Untuk Bangkit Melalui Implementasi E-Government*, Laguboti, Toba, 2005.
- [4] Good Practices in Information and Communication Technology Policies in Asia and The Pacific, 2004, *Technology Development in the Asia-Pacific Region*. United Nations.
- [5] Harijadi, Djoko Agung. *Developing E-government, The Case of Indonesia*. 2004. Presentation on E-government Workshop APECTEL29, Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- [6] Indrajit, Richardus E., 2002, *Electronic Government*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- [7] Kaczorowski, Wili. *Connected Government*. 2004. Cisco System. London.
- [8] Satrya, Eddy, *Pentingnya revitalisasi e-government di Indonesia*, Prosiding Konferensi Nasional TIK di Indonesia, 2006.
- [9] Sosiawan, Edwi Arief, 2003, *Teori Komunikasi Virtual*, Jurnal Ilmu Komunikasi, UPNVY.

- [10] Sosiawan, Edwi Arief, 2004, *Implementasi E-government pada pemerintah Daerah di Indonesia*, Penelitian Semi Que V .
- [11] Suryadi MT, 2002, *TCP/IP dan Internet*, Elex Media Computindo, Jakarta.
- [12] Wescott, Clay, *E-Government: Enabling Asia-Pacific Governments and Citizens to do PublicBusiness Differently*, Paper presented at Asian Development Forum, Bangkok, 14 June 2001.
- [13] Wigrantoro, Mas (2004). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penerapan Good Governance di Indonesia.
- [14] www.depkominfo.go.id
- [15] <http://en.wikipedia.org/wiki/E-Government>
- [16] <http://www.iptek.net.id/ind/?mnu=3&an=2>
- [17] <http://www.madina-sk.com/>
- [18] www.oss-center.net
- [19] <https://www.surabaya-eproc.or.id/>
- [20] <http://www.wartaegov.com/i>